

## BENTURAN IDEOLOGIS: Mungkinkah Harmonisasi Antara Pancasila dan Islam Politik Pasca-Reformasi?

**Leli Salman Al-Farisi**

FISIP - Universitas Wiralodra, Indramayu

Email: salmanpolpum@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Pancasila sebagai ideologi Negara masih membutuhkan penguatan teoritis agar dapat secara ilmiah terus-menerus dapat dikaji dan dikembangkan ke dalam berbagai konsepsi sebagaimana ideologi-ideologi mainstream lainnya, seperti halnya ideologi sosialisme dan ideologi liberalisme yang telah dijadikan landasan teoritis dalam berbagai aspek praktis kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi tersebut, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya sebagian kelompok masyarakat yang belum secara final menerima Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dari kelompok ideologi agama, dalam hal ini adalah kelompok Islam Politik. Negara harus berperan dalam melakukan harmonisasi antara kelompok nasionalis Pancasila dan Islam Politik, oleh karena itu sangat mendesak segera untuk merekonstruksi teori politik baru yang dapat melandasi format hubungan hubungan ideal antara Pancasila dan Islam sebagai ideologi negara.

**Kata Kunci:** *Pancasila, Ideologi Negara, Harmonisasi, dan Islam Politik.*

### PENDAHULUAN

Tampilnya Presiden Joko Widodo yang diusung oleh Partai Politik PDIP pada Pemilu tahun 2014 menjadi momentum bangkitnya kembali kekuatan politik Orde Lama (Soekarnoisme) dalam berbagai ragam wajah dalam arena utama politik nasional Indonesia. Pentas politik nasional menjadi ajang pertarungan ideologis baru antara kelompok pengusung Islam Politik dengan kelompok pengusung Ideologi Nasionalis yang kebetulan menjadi bagian dari penyokong rezim penguasa pemerintahan saat ini. Seperti *"Deja Vu Politik"*, dimana masing-masing kekuatan telah mengkonsolidasikan kader dan segala sumber daya politik yang dimilikinya untuk pertarungan panjang babak baru pasca reformasi.

Kekuatan Islam politik telah menampakan kembali wajahnya sejak munculnya arus reformasi tahun 1998 yang meruntuhkan kekuatan Orde Baru dari pentas politik Indonesia, namun belum cukup terkonsolidasi secara nasional baru tersemayam di beberapa daerah menjadi kekuatan politik lokal, misalnya seperti yang dikenal dengan munculnya **"Gerakan Perda Syariah"**. Peristiwa 11 September 2001 menjadi tonggak awal lahirnya era baru kekuatan Islam Politik global di pentas dunia internasional dengan beragam variasinya. Pemilu 2014 yang melahirkan Presiden dari kekuatan utama (PDIP) yang mengusung nilai-nilai Soekarnoisme (Orde Lama) telah membangkitkan kembali kekuatan-kekuatan yang kontra terhadap kelompok-kelompok yang membawa simbol Islam Politik di Indonesia. Oleh karena itu, selama masa pemerintahan Jokowi tahun 2014 s.d 2019 kemungkinan-kemungkinan terjadinya benturan antara kelompok Islam Politik dengan kelompok Ideologi Nasionalis dalam bentuk ketegangan ideologis semakin mendekati kenyataan dan tidak bisa dielakkan lebih terbuka dan "mudah terbaca" oleh pihak-pihak yang memahami sejarah politik kebangsaan.

Beberapa fakta yang melatar-belakangi menguatkan kemungkinan tersebut, antara lain: **Pertama**, pengakuan administratif kependudukan atas keberadaan warga Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan diakbulkannya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). **Kedua**, Kasus Pilkada DKI tahun 2016 yang menguatkan dugaan praktik politik identitas dan politisasi agama dengan munculnya gerakan politik dari kelompok 212. **Ketiga**, pembubaran Ormas HTI oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 yang isinya mencabut status BHP HTI, proses awalnya pemerintah Perpu Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Ormas. Dalam perkembangan terakhir, pada tanggal 14 Februari 2019, MA mengesahkan pembubaran HTI dengan menolak permohonan kasasi yang diajukan HTI terkait pembubaran Badan Hukum dan Perkumpulan (BHP-HTI) Ormas tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM, atas perkara di MA bernomor register: 27K/TUN/2019. **Keempat**, manuver-manuver politis kelompok ideologi nasionalis secara efektif dan masif dalam meredam gerakan politik 212 untuk melaksanakan Reuni Akbar di tahun 2018. Dimana pelaksanaan perhelatan 'akbar' kelompok 212 tahun 2018 nyaris tanpa ada publikasi *media mainstream* (kecuali TVOne), seolah-olah tidak pernah ada informasi jurnalistik yang meliput kegiatan tersebut. Media sekaliber Tempo baru mengeluarkan ulasan media (klarifikasi resmi) yang terkait dengan sepiunya pemberitaan pelaksanaan Reuni Akbar 212 tahun 2018 melalui "berita" dalam Majalah Berita Mingguan edisi 4-10 Februari 2019 dalam rubrik Ombudsman dengan memuat tulisan berjudul "Reuni 212 dan Fragmentasi Media" dari Eriyanto.

Kondisi aktual kehidupan politik kebangsaan saat ini telah mendorong kesadaran semua pihak untuk melakukan upaya nyata untuk melakukan penegakan dan peningkatan pemahaman kembali nilai-nilai kebhinekaan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar Negara, karena berdasarkan sejarah bangsa Indonesia telah terbukti bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang plural, dan bangsa yang memiliki kemampuan serta daya tahan untuk menjaga keharmonisan dalam keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan Agama melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Secara khusus Pemerintahan Joko Widodo menilai persoalan ideologis tersebut menjadi salah satu masalah strategis kebangsaan, Pemerintah meresponnya dengan dengan penguatan BPIP, yang diawali dengan pembentukan Perangkat baru bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Keputusan pembentukan unit ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sementara itu dinamika global saat ini, negara-negara di belahan dunia lain terutama di kawasan Timur Tengah, Eropa, bahkan di Amerika sedang menghadapi krisis keamanan, krisis politik dan sosial yang berkepanjangan, terjadi perang saudara dengan membawa simbol-simbol agama, terorisme, kejahatan kemanusiaan, serta krisis ekonomi yang mengancam stabilitas negara. Namun sampai saat ini, Indonesia yang kita cintai masih tegak berdiri sebagai bangsa dan negara yang berdaulat dalam kerangka NKRI berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan amanat TAP MPR-RI Nomor XVIII/MPR/1998 mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara harus segera dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Hal ini bermakna bahwa setiap warganegara, apalagi para penyelenggara negara dan pemerintahan, wajib memahami Pancasila secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*) dan mampu untuk mengimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, akan dapat diwujudkan oleh bangsa Indonesia.

Disamping itu, setiap bangsa yang ingin mempertahankan eksistensi, kedaulatan dan integritasnya harus mengetahui dan sadar ke arah mana cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut harus dilandasi oleh pandangan hidup (falsafah bangsa). Oleh karena itu, perlu upaya untuk menyegarkan kembali ingatan kita bahwa dasar negara kita adalah Pancasila juga sebagai pandangan hidup sekaligus sebagai **ideologi negara**. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi tegaknya negara. Sementara sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang hidup di antara sanubari masyarakat kita. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan arah dan pelita kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pembangunan nasional kita. Bahwa dengan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, maka cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial akan tercapai.

Berdasarkan hasil temuan survey dan kajian dari beberapa lembaga independen yang dianggap cukup kredibel dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rentan waktu tahun 2016 s.d tahun 2017, menunjukkan data dan fakta yang cukup mengejutkan sekaligus

mengkhawatirkan tentang kondisi aktual ancaman terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama**, adanya kecenderungan tingginya intoleransi berkembang di masyarakat juga sangat mengancam keberagaman di Indonesia. Survey intoleransi oleh **Wahid Foundation (2016)** menyebutkan bahwa 59.9% dari 1.520 responden, warga Indonesia memiliki kelompok yang dibenci, mereka adalah LGBT, communist, Jewish, Christian, Shia, Wahabi, Buddhist, Chinese, **92.2% dari mereka tidak setuju seseorang dari kelompok tersebut kerja di pemerintahan.** 82.4% dari mereka, kurang berkenan hidup bertetangga dengan salah satu dari group tersebut.

**Kedua**, berdasar pada hasil Survey lain oleh **Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)** adalah lembaga penelitian otonom di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang intoleransi dengan responde 1200 perempuan dan laki-laki juga menunjukkan bahwa meskipun 76% sepakat dengan nilai-nilai Pancasila, dan 84.7% setuju NKRI berbasis Pancasila, tetapi Survey menemukan ada **22.8% sepakat inspirasi negara Islam.** Survey ini juga menunjukkan persepsi buruk terhadap non muslim yaitu 62.7% tdk setuju jadi presiden, 64% setuju jadi guru di sekolah umum; 55.3% membolehkan acara kebaktian: 42.2% tidak boleh, 51.6% setuju membangun gereja: 45.8% tidak setuju.

**Ketiga, LSI Denny J.A** melakukan survei untuk mengetahui prinsip demokrasi yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Hasilnya, mayoritas menginginkan demokrasi Pancasila. Survei dilakukan untuk melihat situasi nasional setelah Pilkada DKI 2017. Ada 1.200 responden yang dipilih dan diwawancara dengan multi stage random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan responden di 34 provinsi pada 5-10 Mei 2017. Survei ini dibiayai sendiri oleh LSI Denny JA. Margin of error survei plus minus 2,9%. Responden ditanya apakah menginginkan Indonesia tumbuh menjadi demokrasi liberal seperti di Amerika Serikat, negara Islam seperti di Timur Tengah, atau berdasarkan keunikan sendiri seperti demokrasi Pancasila. Hasilnya, 74% responden menginginkan demokrasi Pancasila, **sebanyak 8,7% ingin negara Islam**, sementara 2,3% ingin demokrasi liberal. Kemudian ada 15,09% yang tidak menjawab. Survei menunjukkan bahwa 72,5% responden tidak nyaman dengan berlanjutnya polarisasi masyarakat pro dan kontra Ahok. Sebanyak 75% responden ingin pemerintah untuk menegaskan kembali komitmen menjadikan demokrasi Pancasila sebagai perekat. Sebanyak 68,7% responden mengatakan demokrasi Pancasila yang dimaksud bukanlah demokrasi Pancasila era orde baru.

**Keempat**, hasil survei **Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)** yang digelar 14-20 Mei 2017. Survei melibatkan 1.500 responden dengan menggunakan metode random (*multistage random sampling*) dengan *margin of error* 2,7%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 79,3% responden menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945 yang terbaik bagi rakyat Indonesia. **Hanya sekitar 9,2% yang setuju NKRI bersandar pada Pancasila dan UUD 1945 diganti dengan Negara Islam atau khilafah.** "Hanya satu dari 10 orang Indonesia yang secara eksplisit menginginkan NKRI diganti khilafah,". Sementara sebanyak 11, 5% responden menjawab tidak tahu dan tidak menjawab. Latar belakang SMRC melakukan survei karena belakangan muncul berbagai opini dan pemberitaan yang berkaitan dengan isu fundamental negara-bangsa, yakni apakah NKRI yang bersandar pada konstitusi (Pancasila dan UUD) bisa bertahan.

Mencermati kondisi tersebut, memunculkan beberapa asumsi dasar yang dapat menjadi sebuah hipotesis untuk kajian akademis lebih mendalam. *Asumsi pertama*, Pemerintahan Joko Widodo merupakan 'anti tesis' pemerintahan Orde Baru; *Asumsi kedua*, Pancasila sebagai Ideologi negara masih belum final bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama kelompok Islam Politik; *Asumsi ketiga*, Ideologi Nasionalis dan Islam Politik akan terus berkompetisi baik secara terbuka maupun tertutup dengan memunculkan ketegangan-ketegangan politik dan menjadi acaman serius terhadap eksistensi dan ketahanan Ideologi Pancasila. *Asumsi keempat*, belum adanya aktor dan lembaga formal yang dimandatkan oleh Negara secara khusus menjalankan fungsi ideologisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pasca reformasi

Hipotesis yang diajukan berdasarkan ausmsi dasar tersebut adalah **"Ketahanan Pancasila sebagai Ideologi Negara, ditentukan oleh kemampuan Negara dalam**

*mengharmonisasikan antara Islam Politik dengan Ideologi Nasionalis*". Oleh karena itu, upaya-upaya untuk dekonstruksi teori sangat mendesak untuk dilakukan agar dapat mengkonstruksi ulang hubungan antara Negara dan Agama. Hal ini adalah bagaimana hubungan keratif dinamis antara Pancasila dan Islam. Namun pada sisi yang lain, Negara harus mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi yang "wajib" dijadikan landasan yuridis-normatif dan kerangka acuan politis dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Dalam konteks politik global, fenomena persitiwa benturan ideologi pernah menjadi kajian akademik yang menarik banyak minat dan memicu pro-kontra bahkan menggemparkan komunitas ilmuan politik dan praktisi pemerintahan. Fukuyama (1989) dalam tulisnya *"The End of History"*, sebagaimana dikutip dalam buku Huntington (1996:16) yang berjudul *"Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia"*. Menurut Fukuyama bahwa akhir sejarah yang sedemikian itu: yakni akhir dari evolusi ideologis umta manusia dan universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final dari (sistem) pemerintahan umat manusia. Berbagai konflik akan terjadi di (negara-negara) Dunia Ketiga, akan tetapi konflik global telah berakhir, dan tidak hanya di Eropa. "Tepatnya di luar Eropa," perubahan-perubahan besar telah terjadi, terutama di Cina dan Rusia. Perang ide pun berakhir. Orang-orang yang berpandangan Marxis-Leninisme mungkin masih dapat dijumpai "diberbagai tempat seperti di Managua, Pyongyang, Cambridge, dan Massachusetts," namun, bagaimanapun juga, demokrasi liberal telah menang. Masa depan tidak lagi bertumpu pada perjuangan untuk memenangkan ide-ide, tapi lebih bertumpu pada bagaiman cara mencarikan solusi bagi persoalan-persolan ekonomis dan teknis.

Dalam analisis Huntington (1996:62-63), bahwa ideologi-ideologi politik yang besar pada abad XII, termasuk di dalamnya liberalisme, sosialisme, anarkhisme, korporatisme, Marxisme, komunisme, demokrasi sosial, konservatisme, nasionalisme, fasisme, dan demokrasi Kristen, seluruhnya merupakan produk peradaban Barat. Tiada satu pun peradaban lain yang mampu menggerakkan sebuah ideologi politik yang signifikan. Namun, sebaliknya, Barat tidak pernah memiliki sebuah agama besar. Agama-agama besar dunia seluruhnya adalah "produk" peradaban-peradaban non Barat, dan dalam sebagian besar kasus, berlawanan dengan peradaban Barat. Ketika dunia bergerak keluar dari fase yang dilampui Barat, ideologi-ideologi yang dicirikan dengan peradaban Barat mengalami kemunduran, dan tempat mereka diambilah oleh agama-agama dan peradaban-peradaban lain yang secara kultural memiliki bentuk-bentuk dasar identitas dan kesamaan. Pemisahan Westphalia antara agama dan politik internasional, sebagai produk idiosinkretis peradaban Barat, akah berakhir, dan agama, sebagaimana dinyatakan Edward Mortimer, "akan sangat berperan dalam urusan-urusan internasional". Benturan antar peradaban dari pandangan-pandangan politik dihembuskan Barat dan dipicu oleh sebuah benturan antarperadaban, antara kebudayaan versus agama.

Dalam konteks Indonesia, dengan menggunakan kerangka analisis dan teoritis benturan antar peradaban yang dikemukakan oleh Huntington (1996), peristiwa benturan antara Pancasila dan Islam telah memiliki pijakan teoritis yang cukup kuat serta secara praktis membuktikan adanya korelasi dengan rangkaian panjang (sejarah konflik politik) proses benturan antara Barat dan Islam dalam tatanan politik global dari masa ke masa. Dengan keruntuhan ideologi komunis di Rusia, dapat dikatakan bahwa lawan sebanding untuk Barat adalah Islam, oleh karena itu menurut Huntington (1996:180- 202) kebangkitan Islam menjadi acaman terhadap dominasi Barat di negara-negara yang akan menjadi kekuatan inti dari kebangkitan Islam tersbut. Menurutnya kebangkitan Islam merupakan pengejawantahan usaha-usaha yang dilakukan oleh umat Islam untuk mencapai tujuan (mewujudkan Islam bukan sekedar agama, tapi sebagai *way of life* dan modernisasi, tapi bukan *Westernisasi*). Kebangkitan Islam adalah sebuah bentuk luas dari gerakan intelektual, kultural, sosial, dan politis yang menyebar di seluruh dunia Islam. Dalam manifestasi-manifestasi politisnya, Kebangkitan Islam dalam beberapa hal menggantikan Marxisme.

Lebih lanjut, Huntington (1996:316) secara khusus menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 6 (enam) negara Islam (Indonesia, Mesir, Iran, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki) yang berpotensi menjadi pusat kekuatan Islam untuk dapat menggerakkan kekuatan Islam sebagai negara inti dalam konteks politik global. Namun faktanya, kekuatan Islam saat ini hanya sebatas "kesadaran tanpa keterikatan". Akhirnya lebih menonjol peristiwa konfliknya

(bahkan dalam kondisi aktual, banyak negara Islam yang abadi dalam konflik bahkan menghadapi kepunahan) secara internal di negara-negara Islam itu sendiri, ketimbang mengkonsolidasikan diri menjadi kekuatan politik untuk menghadapi dominasi Barat dalam kancah politik global. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan absennya Negara Islam yang berperan sebagai negara inti merupakan faktor utama yang menjadi sebab terjadinya konflik-konflik internal maupun eksternal di kalangan masyarakat Islam. Kesadaran tanpa keterikatan menjadi sumber kelemahan Islam serta memudahkan jalan bagi kemungkinan timbulnya ancaman dari peradaban lain.

## FOKUS MASALAH DAN RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi obyektif tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk menelusuri beberapa teori awal yang telah menjelaskan hubungan antara Islam dan Pancasila, kemudian merumuskan teori baru yang lebih kompatible dalam mengharmoniskan antara Islam dan Pancasila. Selanjutnya, pada tataran praktisnya akan mendeskripsikan langkah-langkah apa yang seharusnya dijalankan oleh negara untuk mengembalikan Pancasila sebagai Ideologi tunggal yang dapat menjiwai sistem politik dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Penjelasan Pancasila sebagai Ideologi dalam beberapa kajian akademik belum cukup memadai jumlah dan kualitasnya untuk menjawab tantangan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Oleh karena itu, mengawali kajian ini dibutuhkan landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan Pancasila sebagai Ideologi. Belum ada penjelasan teoritis dalam literatur-literatur politik bahwa Pancasila memenuhi kriteria teoritis dikatakan sebagai sebuah Ideologi seperti yang telah lajim dikenal dalam berbagai literatur serta dunia akademisi politik seperti Liberalisme, Konservatisme, Sosialisme, dan Komunisme. Logis kiranya kalau ada pemikiran posisi keilmiah Pancasila harus berani kita diuji kembali sebagai sebuah ideologi agar bisa sejajar nilai-nilai rasionalitasnya daripada mitologi politiknya dengan ideologi-ideologi lain yang telah mendominasi wacana akademis, karena akan menentukan kekuatan legitimasi teoritis dan praktis dalam pengembangan Ilmu Politik lebih lanjut. Setidaknya, belum ada satu pun karya ilmiah yang benar-benar netral, objektif, fokus dan mendalam mengkaji permasalahan tersebut, yaitu apakah Pancasila dapat diklasifikasikan secara teoritis dan objektif sebagai Ideologi Politik.

Sehubungan dengan tersebut, kajian mendalam ini bertujuan untuk memberikan jawaban, mendeskripsikan argumentasi dan penjelasannya, serta merumuskan usulan alternatif teori baru tentang beberapa permasalahan faktual dan kerancuan teoritis melalui beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Pertama**, apakah Pancasila telah diterima oleh kelompok Islam Politik sebagai Ideologi Negara; **Kedua**, Kelompok-kelompok mana dan bentuk-bentuk penolakan seperti apa terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara; **Ketiga**, Faktor-faktor apa saja yang melatar-belakangi dan pemicu munculnya konflik politik antara kelompok nasionalis Pancasila dan Islam Politik; **Keempat**, bagaimana bentuk intervensi negara yang dapat meredakan benturan ideologis antara kelompok nasionalis Pancasila dan Islam Politik; dan **Kelima**, rumusan teologi politik apa yang dapat merekonstruksi teori politik yang dapat melandasi format hubungan hubungan ideal antara Pancasila dan Islam sebagai ideologi politik.

Mengingat luasnya fokus permasalahan tersebut, maka hasil pembahasan kajian dalam tulisan ini dapat dibagi ke dalam dua artikel. Pembahasan kajian pada bagian tulisan pertama yaitu membahas Latar belakang, Konstruksi teoritis; serta Benturan ideologi: Pancasila dan Islam Politik. Sedangkan pada tulisan bagian kedua membahas hasil kajian dengan diberi judul tulisan Harmonisasi Pancasila dan Islam. Dalam bagian ini juga ditelaah mengenai faktor-faktor pemicu konflik politik antara kelompok nasionalis Pancasila dan Islam Politik; Rekonstruksi Teori Politik: Teologi Politik Baru dalam Kajian Politik Islam; dan Intervensi Negara: Strategi Formalisme Kelembagaan Ideologisasi Era Reformasi.

## KONSTRUKSI TEORITIS

Konsep ideologi dapat dengan mudah dipahami dengan membaca buku **Thompson** (2015:42-103) yang berjudul "*Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*". Untuk lebih mempertajam kerangka teoritis dan analisis tentang ideologi, buku **Thompson** (2014) yang berjudul "*Analisis Ideologi Dunia: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*" dapat dijadikan rujukan utama.

Menurut **Thompson** (2014:14-15) tentang konseptualisasi ideologi, dalam bukunya menjelaskan bahwa istilah ideologi memiliki sejarah panjang dan kompleks, yang tampak dalam beberapa karya penulis dan merembes ke beberapa disiplin modern dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Jika diteliti tentang akurasinya dalam literatur akan menunjukkan bahwa istilah tersebut digunakan dalam **dua cara** yang sangat berbeda. Di satu sisi, "ideologi" digunakan oleh beberapa penulis sebagai sebuah istilah yang murni deskriptif: sebagai '*sistem berpikir*', '*sistem kepercayaan*', '*praktik-praktik simbolik*' yang berhubungan dengan tindakan sosial dan politik. Penggunaan istilah ini telah memunculkan apa yang disebut dengan konsepsi netral (*neutral conception*) tentang ideologi. Tidak ada upaya, pada basis konsepsi ini, untuk memisahkan antara jenis-jenis tindakan dengan animasi ideologi; ideologi hadir dalam setiap program politik, mengabaikan program yang dimaksudkan sebagai pemeliharaan dan transformasi tatanan sosial. Namun bagaimanapun, terdapat pemahaman lain tentang 'ideologi' yang dibuktikan di beberapa literatur lainnya. Dalam beberapa tulisan, ideologi secara mendasar berhubungan dengan proses pembenaran hubungan kekuasaan yang tidak simetris, berhubungan dengan proses pembenaran dominasi. Penggunaan istilah yang demikian menunjukkan apa yang disebut konsepsi kritis ideologi (*critical conception of ideology*). Penggunaan ini mengandung konotasi negatif yang selalu dibawa istilah tersebut melalui sejarahnya dan penggunaan ini akan selalu mengikat analisa ideologi pada pertanyaan kritis. Berdasarkan asumsi tersebut, maka menurutnya (2015: 16) konsep ideologi dapat digunakan untuk merujuk cara-cara bagaimana makna digunakan, dalam hal tertentu, untuk membangun dan mempertahankan relasi kekuasaan yang secara simetris bersifat asimetris yang kemudian disebut 'relasi dominasi'. Ideologi, secara luas dinyatakan, adalah makna yang digunakan untuk kekuasaan.

Secara teoritis, konsep Ideologi dalam literatur Ilmu Politik dapat merujuk pendapatnya **Andrew Heywood** (2016:8-9) dalam bukunya "*Ideologi Politik Sebuah Pengantar*", menyebutkan bahwa Ideologi bermakna sebagai berikut:

1. Sebuah sistem keyakinan politik
2. Sebuah perangkat berorientasi tindakan dari ide-ide politik
3. Ide-ide yang dipegang kelas berkuasa
4. Cara pandang tentang kelas sosial atau kelompok tertentu
5. Ide-ide politik yang membentuk atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingan kelas atau sosial
6. Ide-ide yang membongkar kesadarankeliru/semu/palsu (*fals consciousness*) yang sudah lama disuapkan ke benak kaum tertindas atau tereksplotasi
7. Ide-ide yang menyituasikan individu dalam sebuah konteks sosial dan membangkitkan sebuah perasaan kepemilikan kolektif atasnya
8. Seperangkat ide yang secara resmi dianut dan dapat memberi sanksi untuk melegitimasi sebuah sistem atau rezim politik
9. Sebuah doktrin politik yang mengkalim diri dapat merangkul semua orang karenanya memonopoli kebenaran
10. Seperangkat ide politik yang abstrak dan sangat sistematis.

Berdasarkan hal tersebut, **Andrew Heywood** (2016:19) telah merumuskan definisi Ideologi adalah seperangkat ide koheren yang menyediakan basis bagi tindakan politik terorganisasikan antah dimaksudkan untuk mempertahankan, memodifikasi atau menggantikan sistem kuasa yang sudah ada. Dengan demikian, semua Ideologi memiliki tiga ciri penting, yaitu: (1) menawarkan pemahaman tentang tatanan yang ada, biasanya dalam bentuk pandangan dunia; (2) mengembangkan model tentang masa depan yang diinginkan, visi tentang masyarakat yang baik; dan (3) menjelaskan bagaimana perubahan politik dapat dan sebaiknya dilakukan, bagaimana dapat melangkah dari kritik terhadap tatanan yang ada menuju visi tentang masyarakat masa depan.

**Muhammad A.S. Hikam** (2016:42-44) dalam bukunya *“Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme”*. Mengutip pendapat Terry Eagleton, setidaknya ada enam cara untuk memahami pengertian ideologi secara operasional; *Pertama*, Ideologi dalam arti budaya (*culture*); *Kedua*, Ideologi dalam arti pandangan dunia (*world view*); *ketiga*, Ideologi dalam arti alat legitimisasi (*legitimation*); *Keempat*, Ideologi dalam arti alat legitimasi bagi kelompok dominan; *Kelima*, Ideologi dalam arti legitimasi melalui distorsi; *Keenam*, Ideologi sebagai keyakinan semu.

Apabila menggunakan kriteria teoritis Ideologi yang ditawarkan oleh Andrew Heywood dan Terry Eagleton, maka Pancasila sudah pasti dapat dikategorikan sebagai sebuah Ideologi Politik karena memenuhi semua kriteria tersebut. Hanya saja legitimasi akademisnya jauh di bawah legitimasi politis, karena masih memerlukan ada justifikasi ilmiah pendukung lainnya seperti kajian-kajian tentang Pancasila sebelumnya. Oleh karena itu, akan dilacak beberapa literatur inti yang netral, objektif, fokus dan mendalam mengkaji tentang Pancasila sebagai sebuah Ideologi Politik. Terdapat rujukan mutakhir, diantaranya: *Pertama*, buku yang ditulis oleh **Ahmad Syafii Maarif** (2017), berjudul *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara; Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Apabila melihat judulnya memang tidak menyebutkan ada terminologi tentang Ideologi, namun fokus kajian di dalamnya tentang pertentangan ideologis antara kelompok Islam, Nasionalis, dan Komunis pada sisi yang lainnya pada saat awal formasi pembentukan Dasar Negara Indonesia. Sebuah pertarungan ideologi antara Islam dan Pancasila untuk kali yang kedua pada periode pascakemerdekaan. Sayangnya, kajian ilmiahnya dirasakan menjadi kurang netral karena terlalu menonjolkan perspektif nilai-nilai Muhammadiyah dengan klaim label sebuah Ormas Islam modern. *Kedua*, buku yang ditulis oleh **Faisal Ismail** (2017), berjudul *Panorama Sejarah Islam dan Politik Indonesia sebuah studi Komprehensif*. Judul buku ini pun sama sekali tidak menyebut Pancasila dan Ideologi, namun isinya membahas secara tuntas dan komprehensif tentang masalah pertarungan ideologis antara kelompok Islam, Nasionalis, dan Komunis. Melalui pendekatan kajian sejarah, diperoleh penjelasan bahwa Pancasila sebenarnya merupakan hasil pertarungan Ideologis antara kelompok-kelompok tersebut. Tidak jauh berbeda dengan buku yang pertama, nilai ilmiahnya cukup terganggu karena kekurang netralannya dalam memilih sudut pandang, karena terlalu mewakili nilai-nilai NU, yang dinilai sebagai Ormas Islam Tradisional. *Ketiga*, buku yang ditulis oleh **R. Saddam Al-Jihad** (2018), berjudul *Pancasila Ideologi Dunia; Sintesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Membaca judulnya saja sudah tergambar jelas bahwa kajian Pancasila sebagai sebuah Ideologi Politik, bahkan mencoba menyandingkan Pancasila dengan ideologi-ideologi besar lainnya seperti Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam. Gagasan besar ini cukup inspiratif dan menjadi rujukan penting untuk penelitian ini. Setidaknya terminologi yang digunakan dalam buku tersebut sejalan dengan kerangka ide pokok yang akan dikembangkan dalam pembahasan fokus permasalahan tentang posisi Pancasila dan Islam sebagai sebuah Ideologi Politik dengan setingan kondisi aktual kebangsaan terjadinya potensi benturan Ideologis pada masa Pemerintahan Joko Widodo.

Selain ketiga buku tersebut, terdapat pula kerangka pemikiran yang cukup untuk menjelaskan tentang kerangka sosiologis ketegangan ideologis antara Pancasila dan Islam. Diantaranya, **Anas Saidi** (2018: 63-64), menjelaskan bahwa hubungan antara Agama dan Pancasila dalam tataran sosiologis ternyata memiliki ketegangan yang paling permanen. Sebagai sumber nilai dan sistem simbolik, keduanya saling memperebutkan dalam menacri pengikut dan mendefinisikan realitas. Padahal, Agama dan Pancasila sesungguhnya bisa saling mengisi dan bekerjasama memperkuat moralitas bangsa tanpa harus memperebutkan arena yang garis demarkasinya sudah jelas. Pancasila tidak mempunyai jangkauan untuk memberi penjelasan kepada semua hal bersifat *beyond reality* atau hal-hal yang bersifat skral. Sebagai Ideologi, Pancasila bersifat profan dan terbuka. Sebaliknya, agama memiliki keterbatasan scope untuk dijadikan landasan etika universal yang bisa mempertemukan kehendak semua agama, karena kosmologinya memang berbeda-beda. Pancasila membutuhkan Agama sebagai sponsor utama dalam mendorong lahirnya etika berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada kesolehan sosial yang dipetik dari ajaran agama. Sebaliknya, Agama membutuhkan Pancasila dalam mempertemukan nilai-nilai universal yang ada dalam seluruh ajaran Agama, seperti keadilan, kesamaan, kemanusiaan dan sebagainya. Simbiosis mutualisme itu sebenarnya bisa terjadi jika keduanya menyadari posisi masing-masing. Lebih

lanjut, menurut Saidi. Selama ini, hubungan itu cenderung mengalami diaektika ketegangan tiada henti. Di satu sisi, derasnya pemahaman puritanisme keagamaan yang mudah memutlakkan tafsir, mendaku kebenaran, menuntut Islam kaffah ala Salafi dan sisten Khilafah model abad ke-7 (arabisasi), telah mnegubah formula religiositas yang semula inklusif, toleran, sinkretis, yang dalam istilah Geertz disebut “*religiousmindedness*” menjadi “*religiousness*” yang cenderung eksklusif, intoleran, keras, dogmatis, anti-nasionalisme, anti-demokrasi, dan anti-tardisi.

Pada tataran paling aktual tentang pergulatan Umat Islam dalam dinamika politik Indonesia di era reformasi layak dipertimbangkan hasil kajian **Carool Kersten (2018)** dalam bukunya yang berjudul “*Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*”, memberikan gambaran komprehensif tentang benturan antar kelompok dalam ‘intern umat Islam’ dalam memposisikan Pancasila dan Islam. Menurut Kersten (2018: 187-191) memberikan ulasan yang sangat faktual dalam “Front Pancasila untuk Memayungi Indonesia dari ‘Bayang-Bayang Talibanisasi’”. Hasil pemetaannya menjelaskan bahwa benturan terjadi antara kelompok *Islam Reaksioner* dengan kelompok *Islam Progresif* berkaitan dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 2005 yang mengharamkan Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam dalam hal akidah dan ibadah. Dalam tulisannya menyebutkan bahwa beberapa peristiwa yang terjadi menjelang peringatan Hari Pancasila, 1 Juni 2006 menunjukkan besarnya pertarungan politik dalam benturan di seputar Pancasila. Ini juga menunjukkan bahwa antagonisme ideologis antara kedua kubu yang bertentangan di dalam spektrum Muslim tidak dapat disederhanakan sebagai polaritas yang tak bisa didamaikan di antara berbagai pandangan intelektual mengenai peran agama dalam kehidupan publik.

Dalam kesimpulan Kersten (2018: 319-320) menuturkan bahwa sengitnya perdebatan tentang persoalan tersebut tidak hanya dikarenakan perbedaan sudut pandang intelektual mengenai bagaimana agama mesti berfungsi dalam kehidupan publik. Politik juga berkontribusi terhadap ketegangan agama di Indonesia saat ini. Intelektual progresif maupun reaksioner dipusingkan oleh dua hal: *Pertama*, kuatnya kelompok elit politik Indonesia dan kemampuan mereka untuk memanipulasi proses politik demi kepentingan mereka sendiri. Meski selama 15 tahun terakhir Indonesia secara formal menjalankan proses demokratisasi berdasarkan ideologi negara yang nampaknya didukung mayoritas masyarakat, partai-partai yang sama dari rezim sebelumnya (Orde Baru) dan sering dengan figur-figur yang juga sama terus mendominasi dan mempengaruhi dunia politik Indonesia. *Kedua*, kurangnya kejelasan dan arah politik yang ditempuh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (periode 2004-2014). Dalam persoalan keagamaan khususnya, kebijakan pemerintah kerap ambigu dan penegakan hukum sering gamang dalam menindak kasus kekerasan bercorak keagamaan. Meski pemerintahan SBY mendapatkan suara lebih banyak di masa jabatan keduanya, sepuluh tahun pemerintahannya merupakan periode kesempatan yang terlewatkan.

Berdasarkan bingkai teoritis dan analisis atas fenomena sosiologis tersebut nampak jelas, bahkan sulit terbantahkan kalau saat ini memang sedang terjadi benturan ideologis yang cukup keras, cenderung semakin sengit antara kelompok yang mengusung Ideologi Islam Politik dengan kelompok yang meyakini hanya Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia.

### **BENTURAN IDEOLOGI: Pancasila dan Islam Politik.**

Penggunaan istilah “benturan” dalam tulisan ini tidak terlepas dari pengaruh referensi utama dalam kajian Ilmu Politik, yaitu; *Pertama*, buku **Huntington (1996)** yang berjudul “*Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*”. *Kedua*, buku **Thariq Ali (2003)** yang berjudul “*Benturan antar Fundamentalis; Jihad Melawan Imperialisme Amerika*”. Sekilas membaca judul ke-dua buku tersebut, mungkin awalnya hanya menginspirasi untuk menggunakan kata “benturan” semata tanpa mencari keterkaitan teoritis dan analisis praktis dari pokok kajiannya. Akan tetapi setelah mempelajari lebih mendalam masing-masing buku tersebut, sungguh telah membuka cakrawala dan memberikan landasan teoritis serta kerangka analisis untuk mengkaji jauh lebih tajam lagi tentang fokus masalah “benturan ideologi”. Bahkan, menurut dugaan awal bahwa makna sesungguhnya dari benturan antar peradaban



yang digagas oleh Huntington dan benturan antar fundamentalis dalam tulisan Ali, hakikatnya adalah gambaran panjang dari proses benturan ideologi arus utama dunia saat ini.

Kerangka analisis tentang beberapa faktor yang menyebabkan benturan antara Islam dengan Barat yang ditawarkan oleh **Huntington** (1996:381-383), terdapat pelbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya konflik antara Islam dengan Barat (baca: Kristen) pada akhir abad XX. *Pertama*, pertumbuhan penduduk Muslim yang begitu pesat menyebabkan terjadinya banyaknya pengangguran dan mendorong anak-anak muda masuk menjadi anggota kelompok-kelompok Islamis, melakukan tekanan terhadap penduduk sekitar dan bermigrasi ke Barat. *Kedua*, kebangkitan Islam memberikan keyakinan baru di kalangan umat Islam terhadap watak dan keluhuran peradaban serta nilai-nilai yang mereka miliki dibanding peradaban serta nilai-nilai Barat. *Ketiga*, upaya-upaya Barat yang simultan untuk mempropagandakan nilai-nilai dan institusi-institusi mereka, mempertahankan superioritas kekuatan militer dan ekonomi mereka, serta intervensi mereka terhadap pelbagai konflik yang terjadi di dunia Islam menimbulkan “sakit hati” di kalangan umat Islam. *Keempat*, runtuhnya komunisme menjadi sebab timbulnya keyakinan akan adanya musuh bersama antara Islam dengan Barat dan melupakan permusuhan masa lalu. *Kelima*, terjadinya hubungan dan pencampuran antara orang-orang Islam dengan orang-orang Barat menstimulasi munculnya rasa identitas keduanya dan bagaimana membedakan antara satu dengan yang lain. Lebih lanjut menurutnya, selama Islam tetap sebagai Islam (dan akan tetap demikian), Barat tetap Barat (yang tampaknya tidak dapat dipastikan), konflik fundamental antara dua peradaban besar dan dua *way of life* ini akan terus terjadi di masa yang akan datang sebagaimana ia pernah terjadi empat belas abad yang lalu.

Kesimpulan **Huntington** (1996:394) dalam pandangannya sebab-sebab yang memicu terjadinya konflik antara Barat dengan Islam. Bagi Barat, yang menjadi “ganjalan” utama bukanlah fundamentalisme Islam, tapi Islam itu sendiri, sebuah peradaban yang masyarakatnya berbeda dengan kebudayaan mereka yang diyakini memiliki keunggulan dan terobsesi dengan inferioritas kekuatan mereka. Bagi Islam, yang menjadi persoalan bukan CIA atau Departemen Pertahanan A.S., tapi Barat, sebuah peradaban yang berbeda di mana masyarakatnya meyakini universalitas serta keluhuran kebudayaan mereka. Jika mereka mengalami kemunduran, terdapat kekuatan yang mengharuskan mereka menyebarkan kebudayaan mereka di seluruh dunia. Menarik untuk dipertimbangkan, bahwa penyebab yang memungkinkan terjadinya konflik di kalangan umat Islam, bukan saja karena konflik historikal (internal-Muslim) dan konflik kontemporer (eksternal dan internal). Menurut **Huntington** (1996:491), bahwa salah satu faktor yang lebih bersifat persuasif tampaknya mampu menjelaskan mengapa konflik internal maupun eksternal di kalangan masyarakat Islam adalah karena absennya satu atau lebih negara inti di negara-negara Islam. Para pembela Islam seringkali membantah kritik Barat yang menyatakan bahwa terdapat sebuah pusat kekuatan yang diarahkan untuk memobilisasi dan mengkoordinasi “perlawanan” terhadap Barat dan masyarakat-masyarakat lain. Jika percaya pada kritik ini, mereka berarti salah. Islam adalah sumber instabilitas dunia karena ia tidak memiliki kekuatan inti yang dominan. Berbagai negara seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, Turki, dan barangkali Indonesia, terilhami untuk “memimpin” Islam, karenanya saling berlomba menunjukkan pengaruhnya di dunia Islam; tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang memiliki kekuatan untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di negara-negara Islam; dan tidak satu pun yang secara otoritatif berbuat atas nama Islam dalam kaitan dengan konflik-konflik yang terjadi antara kaum Muslim dengan non-Muslim.

Kemungkinan terjadinya benturan Ideologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dengan mengikuti analisis **Elwin Tobing** (2018:44-50) dalam bukunya yang berjudul *Indonesian Dream; Revitalisasi dan Realisasi Pancasila sebagai Cita-Cita Bangsa* menyebutkan bahwa benturan dalam penerimaan dan pemahaman Pancasila sebagai dasar negara yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, realitas di zaman Orde Baru yang menempatkan Pancasila sebagai hal yang sakral dan mistis. *Kedua*, interpretasi Pancasila cenderung menggunakan pendekatan “abu-abu” atau yang bisa juga disebut dengan istilah “*neither-nor*”. *Ketiga*, hampir mirip dengan pendekatan “*neither-nor*”, Pancasila yang terbuka terhadap sistem nilai yang berkembang, sepanjang itu bisa disintesis dan kemudian diadopsi. *Keempat*, kecenderungan interpretasi Pancasila secara parsial. *Kelima*, adanya

kecenderungan penekanan nilai-nilai normatif Pancasila. *Keenam*, yang tidak kalah penting adalah kecenderungan kooptasi negara atas individu.

Lebih tegas tentang kemungkinan terjadinya benturan ideologi disebabkan karena adanya “tafsir tunggal” dari rezim penguasa atas Pancasila. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh **Rocky Gerung** (2018:40-41) dalam tulisannya yang berjudul *Pancasila: Ide Penuntun, Bukan Pengatur*, menjelaskan problem Pancasila itu pada hakikatnya karena proses indoktrinasi yang dilakukan oleh Orde Lama dan Orde Baru. Ditegaskan olehnya bahwa istilah “pemurnian Pancasila” adalah proyek ideologi Orde Baru melalui Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sepenuhnya indoktrinatif. Lebih lanjut disebutkan pemurnian Pancasila adalah indoktrinasi baru menggantikan indoktrinasi Orde Lama yang juga menjadikan Pancasila sebagai jimat politik. Oleh karena itu, menurutnya baik masa Soekarno maupun era Soeharto, Pancasila bekerja sebagai ideologi reaksioner. Ia diaktifkan sekedar untuk membungkam kritik, mematikan oposisi, dan melanjutkan kekuasaan. Dalam pandangannya kondisi tersebut dapat disejajarkan dengan tradisi Althusserian yang menyebutnya sebagai fenomena “aparatus ideologi negara”. Dalam catatan kakinya dijelaskan lebih lanjut oleh Rocky Gerung, konteks analisis Althusser adalah tentang reproduksi suatu sistem kekuasaan melalui praktik ideologi. Saya meminjam konsep “Aparatus Ideologi Negara” karena hanya itu jalan pikiran yang memadai untuk aktivitas ideologi dalam politik Indonesia. Reproduksi kekuasaan memanfaatkan kurikulum dan peralatan kebudayaan. Akan tetapi, Pancasila sendiri tidak cukup ketat untuk dikonsepsikan sebagai ideologi. Jadi, yang lebih penting adalah memahami aktivitas penanaman ideologi dalam politik Indonesia melalui Pancasila sebagai alat reproduksi, dan mengapa ia tidak efektif.

**Asep Salahudin** dalam tulisannya tentang “*Pancasila dan Agama*” (Kompas, 3 September 2018) menjelaskan bahwa kita tidak menutup mata bahwa Pancasila dalam langgam sejarah bangsa pernah dibelokkan hanya untuk mengabdikan kepentingan penguasa, penafsirannya dimonopoli sekedar melayani rezim sebuah orde. Namun, pengalaman getir ini tidak kemudian menjadi alasan untuk bersama-sama menguburkan Pancasila, justru ia menjadi tantangan tersendiri bagaimana penguasa hari ini dan seterusnya dalam sistem demokrasi mampu membuktikan bahwa Pancasila itu “sakti” benar adanya dan setiap silanya adalah rajah mujarab untuk menyembuhkan problem keindonesiaan. Pancasila menjadi sebuah kebenaran tidak saja secara verbal, tetapi memberikan inspirasi bagi penguasa untuk selekasnya membuktikan tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Walaupun demikian, menurutnya Pancasila memiliki nilai-nilai universal. Nilai-nilai Pancasila itulah yang bersifat universal. Melintasi batas-batas agama formal dan bahkan menampung seluruh kearifan yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa sehingga kehadirannya diterima semua kalangan. Pancasila mampu tampil memberikan jawaban memuaskan baik bagi kelompok sekuler maupun religius, bagi kalangan sosialis ataupun nasionalis. Kalau menating diksi mukjizat, harus saya katakan Pancasila merupakan mukjizat ideologis terbesar yang Allah turunkan untuk bangsa Indonesia sebagai hadiah kemerdekaan. Hanya Pancasila yang memiliki kemampuan daya rekat keragaman etnik, budaya, dan agama, sekaligus yang paling berpeluang membuktikan klaim rahmatan lil alamin dan damai kasih yang menjadi modus utama kelahiran setiap agama. Pancasila jalan tengah dari pancawarna ideologi yang dicari sejak awal abad ke-20 oleh manusia pergerakan. Dan, ideologi seperti inilah—diakui atau tidak—yang tidak dimiliki masyarakat Muslim Timur Tengah sehingga nyaris setiap saat selalu terjadi bentrok berdarah, baik antarnegara maupun di dalam negara itu sendiri: antara masyarakat dan penguasanya. Mereka bersengketa di samping alasan disparitas ekonomi juga dikeruhkan persoalan ideologi negara yang masih terus mencari bentuk—belum lagi tafsir agama yang seolah tak menemukan titik temunya—yang belum selesai mendapatkan format ideal hubungan agama dan negara. Satu sama lain melakukan pendakuan dan beranggapan di luar dirinya sebagai keliru, kafir, dan menyesatkan.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pancasila-lah yang memberi kepastian tampil ke depan mengingatkan kelirunya kelompok radikal kanan dan ekstrem kiri yang hendak memaksakan pendiriannya, yang sesungguhnya tak mengakar di jantung kultural masyarakat Indonesia. Baik Islamisme (Darul Islam/NII) maupun komunisme (Partai Komunis Indonesia) gagal total bukan karena gerakannya menggunakan jalur kekerasan saja, melainkan juga ideologi yang ditawarkannya sama sekali tidak mengakar dan tidak bisa menawarkan penjelasan memadai

tentang konsep bernegara relasinya dengan masyarakat multikultural. Yang satu membayangkan fantasi arkaik-utopis Islam Abad Pertengahan yang hidup di dataran gurun Timur Tengah, satunya lagi merujuk kepada negara Uni Soviet ciptaan Stalin-Lenin tanpa penafsiran kreatif. Hari ini Uni Soviet malah bubar mengalami balkanisasi, dan Timur Tengah juga tak henti didera konflik "musim semi" berkepanjangan.

Problem tentang tafsir tunggal rezim penguasa atas Pancasila, bukan satu-satunya faktor yang memicu terjadinya benturan ideologi, akan tetapi dipengaruhi juga oleh masih adanya "kelompok anti Pancasila". Terkait hal ini, gambaran dari **Ainur Rofiq Al Amin** (Kompas, 26 Januari 2019), dalam opininya yang diberi judul "*Deideologisasi Anti-Pancasila*" menjelaskan bahwa masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya atau bahkan menolak relasi kompatibel antara Islam dan Pancasila. Bahkan masih ada yang ingin mengganti Pancasila dengan Islam. Padahal, jika mereka mau membaca kilas balik sejarah perjalanan bangsa Indonesia, masalah Islam sebagai dasar negara sudah pernah diwacanakan sebelum merdeka, seperti dijelaskan KH. Saifuddin Zuhri dalam karya *masterpiece*, "*Berangkat dari Pesantren*". Pasca kemerdekaan, masalah ini diulangi lagi. Menurut KH. Salahuddin Wahid dalam buku "*Nasionalisme dan Islam Nusantara*", akhirnya muncul tiga tokoh Islam bermusyawarah dan tanpa ragu menghapus tujuh kata dari Piagam Jakarta. Puncaknya, saat rapat-rapat konstituante (1956-1959), wacana Islam sebagai dasar negara tetap disuarakan oleh partai-partai Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti, dan lain-lain), dan pada akhirnya terjadi Dekrit Presiden 1959. Dekrit ini disetujui para tokoh bangsa, termasuk dari kalangan umat Islam. Abdul Mun'im DZ dalam bukunya *Fragmen Sejarah NU* menjelaskan tentang KH Wahab Casbullah, pahlawan nasional yang menyetujui dekrit, asalkan nilai-nilai dalam Piagam Jakarta menjiwai dekrit tersebut. Bung Karno pun sepakat dengan usul KH Wahab. Lebih lanjut menurut Al Amin, sejarah di atas sebenarnya amat cukup bagi yang mau mengambil pelajaran. Namun, faktanya tak demikian. Terdapat sebagian kecil masyarakat yang masih mempertanyakan relasi Pancasila dengan Islam dengan melontarkan pernyataan kenapa tak langsung menerima Islam saja. Muncul ujaran, jika muatan Pancasila sejalan atau malah bagian dari ajaran Islam, kenapa tak langsung memilih Islam saja? Pendapat seperti ini tak menyadari atau malah tak membaca konteks historis proses panjang perjalanan bangsa Indonesia yang melalui banyak liku dan berakhir dengan kesepakatan yang begitu rumit, melelahkan, "berdarah-darah".

Dalam konteks sejarah, benturan antara Pancasila dan Islam digambarkan secara gamblang oleh **Salahuddin Wahid** (Kompas, 19 Mei 2018), dalam tulisannya diberi judul "*Jiwa Kebangsaan*". Menurutnya pilihan Pancasila atau Islam, secara lebih optimistik dan dalam bahas yang lebih positif menjelaskan bahwa kisah klasik kebangsaan kita mengungkap fakta sejarah bahwa terjadi pertentangan pertama antara kelompok Islam dan kelompok Pancasila, terkait masalah dasar negara Pancasila atau Islam dalam persidangan BPUPKI. Inilah untuk pertama kalinya masalah agama muncul dalam konteks politik di Indonesia. Dialog untuk menyelesaikan pertentangan itu berjalan secara damai dan beradab penuh suasana persaudaraan kebangsaan. Tidak ada demo sama sekali atau kata-kata kasar.

Kompromi yang tercapai pada 22 Juni 1945 ialah Piagam Jakarta di mana sila pertama Pancasila dirumuskan dengan kalimat "Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya". Akan tetapi, pada 17 Agustus 1945 sekelompok anak muda yang menyatakan diri mewakili kelompok kristiani di Indonesia Timur menghadap Bung Hatta bahwa jika sila pertama rumusannya seperti itu, kelompok kristiani di Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia. Bung Hatta segera mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam untuk menyampaikan keberatan itu. Kemudian dalam pertemuan itu, para tokoh Islam menunjukkan kebesaran jiwa dengan menyetujui perubahan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Saya pribadi sejak Pemilu 1955 menyetujui Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Terbayangkan oleh saya kalau rumusan sila pertama itu seperti rumusan Piagam Jakarta, akan lebih banyak gejolak timbul.

Bahkan dalam tulisannya tentang "*Keindonesiaan dan Ke-Islaman*" (Kompas, 16 Mei 2017), **Solahuddin Wahid** menjelaskan bahwa sudah ada kompromi antara kelompok Islam dengan kelompok "nasionalis Pancasila". Dengan menyebutkan telah tercapai kesepakatan luhur sebagai bentuk keberhasilan dalam kompromi politik antara kedua kelompok

tersebut. Menjelaskan dalam konteks sejarah bangsa kita telah tercapai **tujuh keberhasilan** dalam upaya memadukan ke-Indonesiaan dan ke-Islaman sebagai berikut:

**Pertama**, pada 17 Agustus 1945, para tokoh Islam dengan lapang dada menyetujui dicoretinya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dan menyetujui rumusan: "Ketuhanan Yang Maha Esa".

**Kedua**, ketika para ulama di bawah pimpinan KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad (22 Oktober 1945), yang mengilhami dan mendorong para pemuda Muslim untuk bertempur melawan tentara Sekutu pada 10 November 1945. Jihad, sebuah istilah agama, digunakan untuk perjuangan bersifat kebangsaan.

**Ketiga**, ketika para tokoh Islam berhasil dalam perjuangan mendirikan Departemen Agama pada Januari 1946.

**Keempat**, pada 1951, Menteri Agama KH A Wahid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Bahder Johan (keduanya dari Partai Masyumi) membuat nota kesepahaman tentang pendirian madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah Aliyah yang memberi tempat bagi pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam dalam bentuk pesantren sebenarnya sudah aktif 500 tahun sebelum Belanda mendirikan sekolah di Hindia Belanda pada 1840, yang menjadi cikal bakal pendidikan nasional Indonesia.

**Kelima**, pada 1973 dilakukan pembahasan terhadap RUU Perkawinan, yang beberapa pasal di dalamnya dianggap oleh para ulama bertentangan dengan hukum Islam. Yang paling penting ialah Pasal 2, yang rumusan awalnya ialah "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut UU ini". Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam KH Bisri Syansuri (murid KH Hasyim Asy'ari) menolak rumusan tersebut dan mengusulkan supaya diganti menjadi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Kalangan non-Islam tentu saja menolak usul tersebut karena hal itu berarti menerima syariat Islam yang partikular ke dalam sistem perundang-undangan kita. Presiden Soeharto menyetujui usulan para ulama itu.

**Keenam**, Pemerintah pada awal 1980-an berusaha supaya Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi parpol dan ormas yang ada di Indonesia. Menghadapi situasi seperti di atas, Syuriah PBNU membentuk sebuah tim untuk mengkaji "**hubungan antara Islam dan Pancasila**". Tim terdiri atas sejumlah ulama mumpuni yang dipimpin KH Ahmad Siddiq, alumnus Pesantren Tebuireng yang pernah mengaji langsung kepada KH Hasyim Asy'ari. Berdasar dokumen "Hubungan Islam Pancasila" yang disusun tim di atas, Mukhtamar NU 1984 di Situbondo memutuskan untuk menerima secara resmi Pancasila sebagai dasar negara. Langkah itu lalu diikuti oleh PPP dan semua ormas Islam, kecuali beberapa ormas yang jumlahnya amat sedikit.

**Ketujuh**, pada 1989, DPR membahas RUU Peradilan Agama sebagai lanjutan dari UU No 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kembalimuncul konflik antara keindonesiaan dan keislaman sehingga terjadi perdebatan panas antara yang menyetujui dan menolak RUU tersebut. Pada 29 Desember 1989, RUU tersebut disetujui menjadi UU No 7/1989. Mukhtamar NU 1989 di Pesantren Krapyak DI Yogyakarta menghargai pengesahan UU tersebut.

Lebih lanjut, **Salahuddin Wahid** dalam tulisannya tentang "Jiwa Kebangsaan" (Kompas, 19 Mei 2018) menyebutnya bukan perbedaan mendasar. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara kelompok Islam dan kelompok Pancasila telah selesai seperti diuraikan di atas. Semua pihak telah menerima Pancasila walaupun terdapat perbedaan dalam menafsirkan sila Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan kecil-kecil akan tetap ada dan diperlukan kearifan untuk tidak mengungkapkan pikiran kita tentang agama yang berpotensi mendatangkan kegaduhan secara terbuka dan diperlukan kepekaan tentang apa yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Solusi dalam mengatasi benturan antara kelompok tersebut, melalui proses dialog secara terbuka. Menurut **Salahuddin Wahid** "*Keindonesiaan dan Ke-Islaman*" (Kompas, 16 Mei 2017), Konflik keindonesiaan dan keislaman itu mungkin meluas pada Pilkada 2018. Kalau pada Pilpres 2019 konflik semacam itu masih terjadi, hal itu berpotensi mengancam persatuan Indonesia. Perlu ada upaya untuk meredamnya. Perlu dilakukan dialog antarkelompok di dalam Islam maupun dengan kalangan agama lain untuk meredamnya. Dalam dialog itu perlu

dibahas dengan rinci apa yang dimaksud dengan "politisasi agama", apa yang dimaksud dengan "isu SARA" (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dialog itu harus dilakukan dengan hati dan kepala dingin supaya dapat menghasilkan kesepakatan yang bisa diikuti dalam praksis sehari-hari. Memang perlu waktu yang cukup untuk bisa mendinginkan suasana.

Pada tataran internal Umat Islam, (terdapat dua kelompok yang selalu berbenturan pada tataran ide-ide bahkan berujung pada aksi adalah *kelompok progresif* dan *kelompok reaksioner*) menurut hasil kajian **Kersten** (2018:326-328) dalam kesimpulannya menggambarkan bahwa proses awal yang melatarbelakangi peristiwa benturan ideologi antara Pancasila dan Islam, pada awalnya, tahun-tahun awal Reformasi seperti mengulang kontestasi politik serupa yang terjadi saat proklamasi kemerdekaan 1945. Setelah upaya politisasi Muslim reaksioner untuk mengembalikan Piagam Jakarta dan memasukannya ke dalam konstitusi kandas, sejumlah kalangan yang pragmatis kemudin beralih ke Paiagam Madinah. Mereka menjadikan perjanjian antara Nabi Muhammad, kaum migran Makkah, dan suku Arab dan Yahudi di Madinah itu sebagai model alternatif bagi pluralitas etnis dan agama di Indonesia. Ia juga menghidupkan debat mengenai kedudukan Pancasila di Indonesia setelah lengsernya Soeharto. Meski tak lagi berfungsi sebagai asa tunggal negara, banyak kalangan Indonesia, termasuk Muslim, menganggap Pancasila masih cocok dengan proses demokratisasi yang baru. Ini kemudian mengembalikan perhatian pada tesis sekularisasi, yang kini mencakup tilikan selama 30 tahun kajian dan pengembangan teorinya sejak pertama kali dikemukakan pada tahun 1960-an. Secara khusus buku **Jose Casanova**, *Public Religion in the Modern World*, yang mempersoalkann marginalisasi dan privatisasi agama di penghujung dunia modern dan *postmodern*, sangatlah berpengaruh. Usulannya untuk menyoal diferensiasi antara negara dan agama, ketimbang pemisahan yang menyeluruh antara satu dan yang lain, dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan dalam mendamaikan Pancasila dalam proses demokratisasi pasca Soeharto. Amunisi intelektual lainnya untuk mendukung hubungan timbal balik antara institusi agama dan politik ditunjukkan oleh karya-karya **Alfred Stepan**, salah satu sarjana terkemuka dalam studi demokrasi terutama gagasannya tentang 'Toleransi Kembar' (*twin tolerations*).

Kontroversi yang berlarut-larut di seputar konsep sekularisme, dan pencampuradukannya dengan konsep sekularitas dan sekularisasi, bukan hanya terjadi antara Muslim progresif dan reaksioner, tetapi juga di antara sesama Muslim progresif. Intelektual di sekitar Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Freedom Institute secara terang-terangan mengaku liberal dalam pandangan politiknya, sedangkan yang lain lebih sungkan. Khawatir istilah liberal dan liberalisme diakitkan dengan diskurus neo-konservatif yang berasal dari Barat dan diekspor dengan tenaga baru pasca tragedi 11 September, kalangan post-tradisionalis Islam kemudian tetap mendekat ke mentornya, Abdurahman Wahid, dan menggambarkan liberalisme lebih sebagai etika sosial, bukan sebagai ideologi politik dengan asosiasi dan konotasi yang tidak diharapkan.

Kontestasi politik tersebut terbawa ke domain hukum. Gagal mencantumkan Piagam Jakarta di dalam Konstitusi baru, para pengusung formalisasi hukum Islam dalam sistem hukum dan yudisial Indonesia menggunakan peluang baru akibat pelimpahan dan desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah untuk memberlakukan Perda Syariat. Di saat yang sama, kalangan penentang Islam yang eksklusivis itu berusaha mengimbangi inisiatif-inisiatif yang disintegratif tersebut dengan merancang legislasi alternatif di tingkat nasional, sambil mengambil sumber Islam alternatif untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal: doktrin *maqashid syari'ah* (tujuan luhur syariat). *Maqashid syari'ah* dapat dianggap sebagai filsafat hukum atau lebih tepatnya lagi sebagai pedoman tindakan moral.

Lebih lanjut Kersten (2018), menjelaskan dengan mendalami formasi diskurif dari kedua pendekatan tersebut, arkeologi dekonstruksionis menunjukkan bahwa kalangan legal formalis maupun substantivis menggali muatan intelektual yang sama bahwa oposisi biner antara keduanya runtuh ketika pembacaan esensial dan disintegratif digantikan dengan dengan pendekatan alternatif yang lebih masuk akal, menggabungkan pemeliharaan koherensi dan kontinuitas tradisi dengan pengakuan terhadap keragaman praktik keagamaan dan respon dinamis yang menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Di tengah peran pemerintah yang ekuivokal, ambiavalen dan terkadang gamang itu, kita bisa kembali argumen bahwa

antagonisme antara kedua kubu tersebut bukan hanya disebabkan oleh pertentangan yang inheren di dalam materi sumber, tetapi lebih disebabkan oleh semakin mengakarnya pendirian masing-masing pihak akibat kisruhnya sistuasi politik di Indonesia pasca lengsernya Soeharto, melalui fase transisi dari era Reformasi awal ke arah konsolidasi proses demokratisasi.

Setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru oleh kekuatan reformasi tahun 1998, dimana tidak adanya lagi kekuatan real politik dan kurang terkonsolidasinya formal politik telah memberikan peluang besar terhadap tampilnya kekuatan-kekuatan politik yang terpinggirkan oleh rezim Orde Baru. Pada satu sisi, kelompok Islam Politik menjadi salah satu kekuatan yang memperoleh ruang gerak politik dengan mengkosiladaikan kembali sumberdaya politiknya melalui lembaga-lembaga politik formal-legal (partai politik dan parlemen), walaupun sebagian besar tetap konsisten berada menjaga jarak di luar sistem politik formal (ormas). Di sisi yang lainnya, kelompok Nasionalis Pancasila memperoleh momentum positif dengan perolehan dukungan politik elektoral yang memungkinkan untuk mengendalikan kekuasaan pemerintahan dengan bantuan dari beberapa partai politik yang pragmatis non ideologis, termasuk di dalamnya beberapa partai politik bersimbol Islam (koalisi politik pragmatis) untuk menjalankan roda pemerintahan. Kondisi ini lah yang menjadi pemicu terjadinya benturan ideologis diantara kelompok-kelompok tersebut, dimana tidak adanya pelembagaan sistem kompromi politik yang dibangun seperti pada masa kekuasaan hegemoni politik rezim Orde Baru. Faktor lemahnya kepemimpinan politik dalam level negara yang mampu mengharmonisasikan antara Pancasila dan Islam, sebagai kunci utama dalam melakukan manajemen konflik politik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Gagalnya kaderisasi politik dan rekrutmen politik Parpol, serta menurunnya (teramputasinya independensi) fungsi Ormas Islam utama (NU dan Muhammadiyah) dalam mengawal Pancasila sebagai Ideologi Negara menjadi akar persoalan yang sesungguhnya dari problem kebangsaan saat ini terkait dengan benturan ideologi antara Pancasila dan Islam.

Kondisi tersebut, sejalan dengan analisis yang dikemukakan **As'ad Said Ali (2016: xi-xii)** dalam pengantar buku yang ditulis oleh Muhammad A.S. Hikam yang berjudul *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Menurutnya, euforia reformasi yang mengagungkan demokrasi ala Barat dan meredupnya Pancasila juga menimbulkan kerancuan dalam memosisikan Pancasila *vis a vis* berbagai ideologi yang bebas muncul setelah 1998. Dengan adanya amandemen UUD 1945 terutama dimasukkannya prinsip-prinsip HAM universal, terdapat anggapan tidak boleh ada pelarangan ideologi karena terkait dengan kebebasan berpendapat. Anggapan seperti inilah yang menimbulkan perayaan ideologi, abik dari ideologi yang berbasis agama maupun yang sekuler. Lebih lanjut, dalam analisisnya kondisi tersebut telah mendorong terjadinya benturan ideologis antara mereka yang menghendaki khalifahan vs mereka yang menghendaki sistem liberal ala Barat. Kelompok sekuler lainnya terutama sisa-sisa pendukung PKI membatasi diri hanya memperjuangkan sosialisme kerakyatan, yaitu prakondisi sebelum tercapainya masyarakat komunis. Mereka yang mendukung Pancasila terhimpit di antara **ketiga kelompok ideologis** tersebut, yakni ultraliberalis/fundamentalisme pasar bebas, sosialisme kerakyatan, dan radikal agama. Kelompok pendukung Pancasila pada mulanya bersikap defensif, tetapi seiring meningkatnya suasana smerawut tanpa pegangan ideologis, perlahan tapi pasti, bangkit kembali untuk berjuang memperkuat posisi Pancasila sebagai rujukan bernegara dan bermasyarakat. Karena Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi parameter dan rujukan segenap kebijakan negara. Ideologis di luar Pancasila sesuai dengan prinsip kebebasan universal diperbolehkan pada wilayah privat, tetapi jika memasuki wilayah publik, maka Pancasila menjadi satu-satunya rujukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila: Jalan Keselamatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES.  
 Ali, As'ad Said. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial Politik dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES.

- Ali, As'ad Said. 2014. *Al-qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES.
- Ali, As'ad Said. 2016. Sekapur Sirih (dalam Muhammad A.S. Hikam. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Halaman vii-xii. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2019. *Pengantar Politik Islam*. (terjemahan) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- A.S. Hikam, Muhammad. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- A.S. Hikam, Muhammad. 2018. *Deradikalisasi Melalui Penguatan Pancasila*. dalam Buku Syaiful Arif. *Islam, Pancasila, Dan Deradikalisasi-Mneguhkan Nilai Keindonesiaan*. Jakarta: PT Elex Media.
- Al-Jihad, R. Saddam. 2018. *Pancasila Ideologi Dunia: Sisntesis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Ali, Tariq. 2009. *Benturan Antar Fundamentalis: Jihad Melawan Imperialisme Amerika*. (terjemahan). Jakarta: Paramdina.
- Fukuyama, Francis. 2016. *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Cetakan keempat (terjemahan) Yogyakarta: Qalam.
- Gerung, Rocky. 2018. *Pancasila: Ide Penuntun, Buka Pengatur*. halaman 40-48 dalam Jurnal Prisma. Volume 37. No.2. 2018 LP3ES.
- Heywood, Andrew. 2015. *Pengantar Teori Politik*. Edidisi ke-4 (terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heywood, Andrew. 2016. *Ideologi Politik: Sebuah Pengantar*. (terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P. 2007. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. (terjemahan). Yogyakarta: Qalam.
- Kersten, Carool. 2018. *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Kersten, Carool. 2018. *Mengislamkan Indonesia: Sejarah Peradban Islam di Nusantara*. (terjemahan) Tangerang Selatan: BACA.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2017. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Pedebatan dalam Konstituante*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2018. *Islam dan Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Thompson, John B. 2014. *Analisis Ideologi Dunia: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. (terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Thompson, John B. 2015. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. (terjemahan). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Umar, Nasaruddin. 2019. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an & Hadis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia.

#### MAJALAH/SURAT KABAR:

- Majalah Mingguan Tempo. Opini: *Ketika Inkumben Menoleh Ke Kanan*. 6-12 Agustus 2018.
- Majalah Mingguan Tempo. Opini: *Garis Politik Bintang Sembilan*. 4-10 Maret 2019.
- Majalah Mingguan Tempo. Opini: *Faktor Ma'ruf Dalam Politik Jokowi*. 17-23 Desember 2018.
- Kadi, Saurip. *Menangkal Radikalisme*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 15 Juni 2019.
- Malik, Musa. *Akar Pancasila dan Tantangan Radikalisme Transnasional*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 22 Juni 2019.
- Wahid, Salahuddin. *Keindonesiaan dan Keislaman*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 16 Mei 2017.
- Wahid, Salahuddin. *Jiwa Kebangsaan*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 19 Mei 2018.
- Yudhistira, Geradi. *Homogenisasi Ideologi*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 24 Maret 2018.

- Al Amin, Ainur Rofiq. *Deideologisasi Anti-Pancasila*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 26 Januari 2019.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. *Islamofobia, Dunia dan RI*. Opini: Surat Kabar Harian Republika. 7 Februari 2017.
- Salahudin, Asep. *Pancasila dan Agama*. Opini: Surat Kabar Harian Kompas. 3 September 2018.